



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO WARDONO
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 442468

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.340.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/122 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/84 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 466 m2/84 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
5. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	205.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.665.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.665.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.